

Tunggu Hasil Uji Fase Tiga, BPOM Belum Beri Izin Vaksin Covid-19

JAKARTA (KM) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac belum dikeluarkan. Pemberian izin harus dipastikan bahwa vaksin tersebut benar-benar aman, berkhasiat, dan mutu yang memadai.

Saat ini BPOM masih menunggu data dari Bio Farma di Bandung untuk interim tiga bulan.

"Kami sedang menunggu data dari Bandung untuk interim tiga bulan yang akan diberikan tiga bulan. Kami juga akan menggunakan data dari Turki dan Brasil," kata Penny dalam konferensi pers daring, Jumat (8/1).

Penny menegaskan, setelah penerbitan izin darurat BPOM juga akan memantau keamanan vaksin secara ketat dalam jangka panjang. Ia menjelaskan, BPOM akan menggunakan beberapa pedoman dalam penerbitan izin. Adapun pedoman tersebut di anta-

ranya dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan European Medical Agency.

"Untuk EUA vaksin harus memiliki data uji klinik fase satu dan dua secara lengkap dalam 6 bulan pemantauan serta data interim fase tiga untuk menunjukkan khasiat dan keamanan," ucapnya.

Sebelumnya, hasil uji klinik di Brazil telah memaparkan data uji mencapai 78 persen. Sementara di negara penguji lainnya, yaitu Turki, mencapai 91 persen.

Penny mengatakan, perbedaan ini terjadi karena faktor jumlah subjek. Ia juga menegaskan bahwa nilai tersebut sudah di atas standar WHO yakni di atas 50 persen. Rencananya, Indonesia akan memulai vaksinasi pada 13 Januari 2021. Namun, Penny mengatakan, tanggal tersebut bukan semata-mata akan mengikat BPOM.

Kendati demikian, ia optimis izin akan keluar sebelum 13 Januari 2021. Sebab, vaksin Sinovac sudah melalui berbagai tahapan dan tinggal menunggu hasil uji klinik fase tiga. ● han

14 Tahanan KPK Positif Covid-19, Dirawat di RSD Wisma Atlet

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan sebanyak 14 tahanan di Rutan Cabang KPK yang bergejala Covid-19, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

"14 tahanan tersebut hari ini Jumat, 8 Januari 2021 telah dipindahkan ke Wisma Atlet untuk menjalani perawatan dan isolasi mandiri dengan pengawasan petugas serta dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/1).

Berdasarkan hasil tes swab PCR yang dilakukan pada Kamis (7/1) ketahuan 14 tahanan yang berada di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, positif terpapar virus korona.

Ali mengatakan, KPK telah melakukan langkah-langkah antisipatif penyebaran Covid-19 dengan dilakukan penelusuran dan juga telah dilakukan tes cepat antigen terhadap para petugas

pengawal tahanan serta petugas rutin.

"Termasuk juga para tahanan yang berada di Rutan Cabang KPK di Gedung C1 (Gedung KPK lama) maupun Pomdam Jaya Guntur juga dilakukan tes cepat antigen dan hasilnya adalah negatif," ujar Ali.

Ali mengatakan, KPK terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan KPK dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat baik tamu maupun pegawai KPK.

"Upaya penyemprotan disinfektan berkala seluruh ruang kerja pimpinan, dewas, pegawai, dan rutan KPK terus dilakukan," kata Ali.

Ia mengatakan penyemprotan disinfektan dilakukan untuk seluruh areal gedung, Rutan Cabang KPK termasuk Ruang Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Setidaknya pada setiap akhir pekan, termasuk pada ruangan tertentu sesuai kebutuhan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan," katanya. ● mei



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN ANDREAU PRIBADI

Tersangka mantan Staf Khusus Menteri KPK Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1). Andreau diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor benih lobster.

Usut Kasus Gratifikasi, Tim KPK Geledah Kantor Wali Kota Batu

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengecekan di Kantor Wali Kota Batu dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu, Jumat (8/1). Pengecekan dilakukan terkait kasus dugaan gratifikasi.

"Hari ini tim penyidik KPK kembali melanjutkan kegiatan pengecekan di dua lokasi yaitu di kantor Wali Kota Batu dan kantor Bappeda Kota Batu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Jumat (8/1).

Ali mengatakan, pengecekan di dua lokasi tersebut masih berlangsung hingga Jumat sore.

Pengecekan itu merupakan pengembangan dari kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2017.

"Terkait kegiatan penyidikan dugaan korupsi perkara gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017," katanya.

KPK sebelumnya telah menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemkot Batu. Pada Rabu (6/1), pe-

nyidik KPK ke kantor Dinas PUPR Batu, kantor Dinas Pendidikan Batu, dan kantor Dinas Pariwisata Batu. Sementara, Kamis (7/1), penyidik menggeledah kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Batu, kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran Batu, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu.

Dari pengecekan selama dua hari tersebut, KPK telah mengamankan berbagai dokumen, antara lain catatan keuangan terkait kasus gratifikasi.

Kasus gratifikasi yang tengah diusut KPK ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Eddy sebelumnya telah divonis bersalah menerima suap senilai Rp 295 juta dan satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filipus Djap.

Atas perbuatannya itu, Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada 2019 lalu. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) saling bersalaman dengan usai memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1). Pertemuan tersebut membahas proses pengadaan dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Risma Ditantang untuk Blusukan ke Pelosok NTT hingga Papua

Mensos Tri Rismaharini membantah tuduhan aksi blusukannya menemui penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta, bukan hal yang dibuat-buat atau settingan.

JAKARTA (IM) - Aksi blusukan Mensos RI Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma di sejumlah wilayah di Jakarta, terus jadi perbincangan publik. Ada yang memuji, menyebutnya settingan, bahkan ada pula yang menantang Risma blusukan ke pelosok Tanah Air.

Risma membantah tuduhan bahwa dia mensetting aksi blusukan bertemu tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta.

Ia menegaskan bahwa dirinya bertemu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta bukan hal yang dibuat-buat. Setiap akan menuju kantor dan pulang kantor, kata Risma, dia selalu melewati jalan yang berbeda-beda.

"Saya tidak tahu jalan di Jakarta, apa yang salah temui dan lihat, itu yang saya ajak bicara. Blusukan ketemu PMKS sudah saya lakukan sejak masih menjadi Wali Kota Surabaya," ujar Risma saat mengunjungi

Balai Rehabilitasi Sosial eks gelandangan dan pengemis Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/1).

Risma menambahkan, dia tidak akan melakukan settingan, sebab tidak ada gunanya. Dia mengaku melakukan itu semua sesuai dengan apa yang ada saat itu.

Sebelumnya, aksi Risma blusukan di Jakarta mendapat respons negatif dari masyarakat dan netizen. Mereka menilai, aksi politisi PDIP itu hanya sekadar pencitraan dan settingan.

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Bekasi, Risma mengatakan bahwa para PMKS di Balai Rehabilitasi Sosial eks gelandangan dan pengemis Pangudi Luhur di Jalan MT HM Juyomartono Bekasi Timur, jreka sementara

harus tinggal di sana karena tidak memiliki identitas dan tempat tinggal.

"Mereka (PMKS) akan dibina dan diberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat," tukas Risma.

Risma Ditantang

Aktivistis Haris Rusly Moti pun menantang Risma blusukan ke sejumlah wilayah di Indonesia. "Sobat, kita tantang Mensos baru, Ibu Risma, ngeblusuk ke pelosok Kalimantan, pelosok Halmahera, pelosok Papua, pelosok NTT. Sabar Bu..Pilkada DKI masih jauh, 2022...hahaha," demikian cuit Moti di akun motizenchannel, Rabu (6/1).

Cuitan Moti itu direspons akun @KMidi82. "Ga usah jauh2 dlu bg.ibu itu tau nya cuma jakarta..."

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam cuitannya hari ini meminta staf Risma memberitahu atasannya bahwa beda menjadi wali kota dan menteri.

"Stafnya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota," demikian Fahri di akun @Fahrihamzah.

Fahri menambahkan, kemiskinan bukan hanya di Jakarta. "Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana...itu rakyat bumbuh diri, bumbuh keluarga, ada ibu bumbuh 3 anaknya karena marat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jabat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data." ● han

Pertahankan Uang Hasil Dagangan, Tangan Ibu Ini Ditebas Begal

MAKASSAR (IM) - Aksi begal sadis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terkam CCTV. Tangan seorang ibu ditebas dengan parang karena berusaha mempertahankan uang hasil dagangannya.

Insiden ini terjadi pada Rabu (6/1) malam saat korban hendak pulang ke rumahnya di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang. Dari rekaman CCTV, pelaku beronceng motor dengan rekannya sudah mengikuti korban dari jalan raya.

Saat kejadian, korban dan anaknya sudah berada di depan

pagar rumah indekos. Tiba-tiba seorang pelaku turun dari motor dan menodongkan senjata tajam ke arah korban.

Ibu rumah tangga ini panik saat pria tersebut meminta paksa tas yang dipegangnya. Dia berusaha mempertahankan tas berisi uang Rp3 juta yang hasil penjualan di warung. Sempat terjadi tarik menarik antara korban dan pelaku.

Karena tak juga menyerahkan tasnya, tangan korban pun langsung ditebas pakai parang. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian jari-jarinya.

Karena khawatir aksinya diketahui warga, pelaku langsung melarikan diri lantaran korban kekeh tak memberikan tas miliknya. Insiden ini terjadi sekitar pukul 23.30 WITA.

"Istri saya waktu itu baru pulang dari warung membawa uang Rp3 juta hasil penjualan warung," kata suami korban, Andi Aso, di Kota Makassar.

Dia sudah melaporkan kasus begal ini ke Polsek Panakukang. Petugas sementara masih menyelidiki kasusnya dan akan mengejar pelaku. ● mei

Menkes dan Menteri BUMN Bahas Pengadaan Vaksin Covid-19 dengan KPK

JAKARTA (IM) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Badan Usaha Milik Negeri Erick Thohir menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1) siang, untuk membahas pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin. Melalui audiensi ini diharapkan KPK dapat memberikan masukan

terkait rencana tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Jumat (8/1).

Ipi menuturkan, pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Bio Farma, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Mereka diterima oleh dua pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedepntan Pencegahan.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan akan mengawal program vaksinasi Covid-19 agar program tersebut tidak menjadi lahan korupsi.

"KPK akan melakukan pendampingan mulai dari perumusan kebijakan sampai ke pelaksanaan, itu yang akan kami lakukan. Sekali lagi, demi sehatnya masyarakat tapi juga tidak terkorupnya dana Covid-19," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon, Senin (21/12) tahun lalu. ● han



IDN/ANTARA

PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Warga terdampak pandemi Covid-19 mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) di kantor Pos, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/1). Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun pada tahun 2021 untuk bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di 34 provinsi guna membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19 serta menggerakkan ekonomi nasional.

SBY: Peluang untuk Sukses Ada, Jangan Kita Sia-siakan ...

JAKARTA (IM) - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, tahun 2020 adalah tahun sangat berat bagi umat manusia.

Sejarah mencatatnya sebagai tahun yang kelam, tahun musibah dan tahun ujian. Secara global, pandemi Corona (Covid-29) yang amat ganas telah memakan korban jiwa sebesar 1,8 juta dan yang terjangkit mencapai 85 juta orang. Dampak dan ikutannya adalah krisis ekonomi yang memukul semua negara di dunia.

Potret negeri kita, Indonesia, kurang lebih sama. Rakyat Indonesia yang terinfeksi Covid-19 dan yang meninggal dunia jumlahnya juga lumayan besar, dan tercatat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ekonomi kita juga mengalami resesi dan tekanan-tekanan lain, yang akhirnya menambah beban hidup dan penderitaan rakyat kita.

"Saya pantau, sikap masyarakat dalam menghadapi tahun baru 2021 cukup beragam. Ada yang pesimis, ada pula yang optimis. Ada yang pasrah dan masa bodoh, ada juga yang punya semangat untuk ikut mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Saya sendiri memilih untuk bersikap lebih optimis (cautious optimism) dan yakin bahwa negeri kita masih punya jalan untuk sukses. Artinya, peluang bagi meredanya badai korona dan pulihnya ekonomi kita memang ada," tulis SBY melalui akun Facebook pribadinya.

SBY menambahkan, peluang ke arah keberhasilan (sukses), bisa kita kaitkan secara langsung dengan apa tantangan dan permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan, jika permasalahan utama bangsa ini dapat kita atasi di tahun 2021 ini, peluang baik itu menjadi kenyataan.

Untuk itu, mata rantainya, negara dan pemerintah mesti bisa mengidentifikasi permasalahan utama kita. Setelah itu, fokus dan mengerahkan segala sumber daya yang kita miliki untuk mengatasinya.

Menurut SBY, tantangan dan permasalahan bangsa yang utama ada tiga. Pertama, pandemi korona yang harus segera diatasi. Kedua, krisis ekonomi yang harus diakhiri dan kemudian ekonomi dipulihkan kembali. Ketiga, mungkin tak terkait langsung dengan dua permasalahan yang lain, yaitu melemahnya kerukunan masyarakat karena faktor iden-

titas, politik dan ideologi yang tak boleh dibiarkan.

Permasalahan yang ketiga ini justru lebih mendasar sifatnya dan jika kita abaikan dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupan bangsa di masa depan. Kalau tidak kita atasi dan kelola dengan baik, disharmoni sosial ini akan membuat bangsa kita benar-benar terpecah dan terbelah (divided).

"Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik, di awal tahun 2021 ini, untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan dan rasakan. Terus terang, ada kekhawatiran saya yang mendalam menyangkut kehidupan bermasyarakat dan berbangsa akhir-akhir ini. Khususnya berkaitan dengan kerukunan masyarakat atau harmoni sosial yang menurut saya terasa retak dan jauh dari semangat persaudaraan kita sebagai bangsa."

"Dengan tekun saya amati apa yang terjadi di negeri kita 3-4 tahun terakhir ini. Bermula dari dinamika politik pada Pilkada Jakarta tahun 2017, seperti halnya dalam kehidupan masyarakat kita terbangun jarak dan pemisah yang semestinya tak terjadi. Terbangun polarisasi yang tajam di antara kita, baik karena faktor identitas, politik maupun ideologi. Seperti halnya masyarakat kita harus dibelah dua ~ kita dan mereka. Bahkan, "kita lawan mereka".

"Sebagian dari kita menganggap mereka yang tidak sama identitasnya (agama misalnya), partai politiknya dan juga garis ideologinya adalah lawan. Untuk bicara pun merasa tidak nyaman. Garis permusuhan ini bahkan menembus lingkaran persahabatan yang sudah terbangun lama, bahkan lingkaran-lingkaran keluarga. Saya sungguh prihatin jika lingkaran tentara dan polisi yang harusnya menjadi contoh dalam persatuan dan persaudaraan kita sebagai bangsa juga tak bebas dari hawa permusuhan ini," katanya. ● han

PENGUMUMAN KORAN

Menunjuk ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diberitahukan bahwa Direksi PT. AVIALINE INDONESIA TRANSPORT, berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan") akan melakukan pengurangan modal sebesar 75% saham dalam perseroan dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 127 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengumumkan bahwa perseroan akan melakukan pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebesar lebih dari 50% yang mana mengakibatkan perubahan terhadap seluruh pemegang saham dan pengendalian terhadap perseroan. Demikian pemberitahuan ini apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menghubungi Direksi Perseroan.

Jakarta, 08 Januari 2021
Ttd
Direksi